

MODUL 1
ILMU POLITIK: RUANG LINGKUP DAN KONSEP
MATA KULIAH PENGANTAR ILMU POLITIK



DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
DR. AUDRA JOVANI, S.SOS, MPS

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Agustus, 2021

MODUL 1

ILMU POLITIK: RUANG LINGKUP DAN KONSEP

A. Pendahuluan

Ilmu politik mengalami perkembangan yang sangat pesat dan saling mempengaruhi dengan cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi dan hukum. Dalam ilmu politik sendiri terdapat lima bidang kajian utama yaitu: teori politik; lembaga-lembaga politik; partai-partai, golongan-golongan (*groups*) dan pendapat umum; dan hubungan internasional. Dan dalam memahami ilmu politik, terdapat beragam definisi, namun secara umum terdapat lima aspek utama yang mendasari definisi ilmu politik yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan umum dan pembagian kekuasaan.

Selain itu, ilmu politik berhubungan dengan konsep-konsep seperti negara, masyarakat, kekuasaan politik, legitimasi, keadilan dan lain sebagainya. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai pengertian dan definisi ilmu politik, bidang kajian ilmu politik, konsep-konsep dan pendekatan dalam ilmu politik.

B. Deskripsi Singkat

Modul 1 ini akan memperkenalkan ilmu politik, sejarah perkembangan, konsep-konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan pembagian kekuasaan. Secara umum, mahasiswa akan memahami mengenai hal-hal dibawah ini:

1. Definisi ilmu politik dan konsep-konsep politik lainnya
2. Bidang-bidang ilmu politik termasuk sejarah dan hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya

C. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Modul 1

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa mampu menjelaskan definisi ilmu politik dan menganalisis perkembangannya termasuk hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi yang saling mempengaruhi.

D. Prasyarat Kompetensi: tidak ada

E. Kegunaan Modul 1:

Mahasiswa mengetahui dan memahami modul 1 yang merupakan pengetahuan dasar politik, termasuk definisi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan pembagian kekuasaan.

Modul mengenai ilmu politik ini sangat berguna bagi mahasiswa untuk memahami lebih dalam mengenai pengertian ilmu politik, definisi ilmu politik, konsep-konsep politik. Dengan mengetahui hal ini, mahasiswa dapat menganalisis mengenai politik dari berbagai aspek.

Kegiatan Pembelajaran 1

A. Perkembangan Ilmu Politik

Para pemikir Yunani Kuno, dimulai dari Plato kemudian Aristoteles mengemukakan gagasan bahwa harus mengedepankan nalar terhadap permasalahan kemanusiaan yang bertujuan agar manusia dapat memerintah dirinya sendiri. Inilah yang menjadi titik tolak penting karena alam semesta tidak lagi dianggap sebagai daerah kekuasaan supranatural (dewa-dewa) tetapi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan.

Pada masa Yunani Kuno, pemikiran tentang negara dan pemerintahan dimulai sekitar 450 S.M dalam karta filsafat Plato, Aristoteles, Herodotus dan sebagainya. Demikian juga di Asia seperti India dan China, di mana terdapat tulisan-tulisan dalam kesusastaan Dharmasastra dan Arthasastra yang berasal dari masa 500 S.M. di China ada Confucius ((± 350 S.M.), Mencius (± 350 S.M) dan mazhab Legalists, antara lain Shang Yang (± 350 S.M.).

Di Indonesia terdapat karya tulis mengenai sejarah dan kenegaraan seperti Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi dan Babad Tanah Jawi.

Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan fokusnya pada negara. Di Inggris permasalahan politik termasuk dalam filsafat, terutama *moral philosophy*, dan bahasannya pada sejarah. Akan tetapi dengan didirikannya *Ecole Libre des Sciences*

Politiques di Paris (1870) dan *London School of Economics and Political Science* (1895), ilmu politik untuk pertama kali di negara-negara ini sebagai disiplin tersendiri yang banyak dipengaruhi dari ilmu hukum, filsafat, dan sejarah sampai Perang Dunia II.

Di Amerika Serikat, perkembangannya berbeda, Mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa memengaruhi bahasan masalah politik, namun demikian terdapat tekanan yang kuat untuk lepas dari tekanan yuridis untuk lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Pada perkembangan selanjutnya bersamaan waktunya dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, kedua cabang ilmu sosial ini banyak memengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik. Pada tahun 1858 seorang sarjana kelahiran Jerman, Francis Lieber, diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di *Columbia College*, dan kejadian ini dianggap sebagai pengakuan pertama terhadap ilmu politik sebagai ilmu tersendiri. Perkembangan selanjutnya berjalan secara cepat, yaitu pada tahun 1904 didirikan *American Political Science Assosiation* (APSA).

Sesudah Perang Dunia II perkembangan ilmu politik semakin pesat. Di Belanda, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum, pada tahun 1947 didirikan *Faculteit der Sociale en Politieke Wetenschappen* (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik) (sekarang namanya *Faculteit der Sociale Wetenschappen* – Fakultas Ilmu Sosial) di Amsterdam. Di Indonesia didirikan fakultas-fakultas yang serupa, yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) seperti di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sini ilmu politik menjadi jurusan tersendiri dengan nama Ilmu Pemerintahan. Selain itu ada juga Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, kemudian berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) seperti di Universitas Indonesia, Jakarta, di mana ilmu politik merupakan jurusan tersendiri.

Di Eropa Timur, perkembangan ilmu-ilmu politik memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, yuridis yang sudah lama digunakan, masih berlaku hingga saat ini. Tapi kemudian perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan dengan pesat sesudah runtuhnya komunisme pada akhir dekade 1990-an. Ini dicirikan dengan masih berlakunya pendekatan tradisional tapi ditambah dengan pendekatan-pendekatan lain yang tengah berkembang di negara-negara Barat.

Sesudah Perang Dunia II, perkembangan ilmu politik semakin pesat karena mendapat dorongan dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam Ilmu Politik, UNESCO pada tahun

1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik dikira-kira 30 negara. Proyek ini, yang dipimpin oleh W. Ebenstein dari *Princeton University* Amerika Serikat, kemudian dibahas oleh beberapa ahli dalam suatu pertemuan di Paris dan menghasilkan buku *Contemporary Political Science* (1948).

UNESCO bersama *International Political Science Association* (IPSA) yang didirikan pada tahun 1949, menyelenggarakan suatu penelitian mendalam yang mencakup kira-kira sepuluh negara, di antaranya negara-negara Barat besar, di samping India, Mexico, dan Polandia. Pada tahun 1952 laporan-laporan ini dibahas dalam suatu konferensi di Cambridge, Inggris, dan hasilnya disusun oleh W.A. Robson dari *London School of Economics and Political Science* dalam buku *The University Teaching of Social Sciences: Political Sciences*. Buku ini merupakan bagian dari suatu rangkaian penerbitan UNESCO mengenai pengajaran beberapa ilmu sosial (termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini merupakan usaha internasional untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

Pada masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi, dan dengan demikian ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Hal ini telah banyak mengubah wajah ilmu politik, di mana ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpandang yang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik.

B. Definisi Ilmu Politik

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan. Mengapa politik memiliki arti penting dalam kehidupan? Hal ini berangkat dari kehidupan masyarakat yang sejak dahulu mengatur kehidupan kolektif dengan baik karena masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam dan perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua masyarakat merasa bahagia dan puas. Inilah yang dinamakan politik. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan usaha yang didapat dengan berbagai cara dan ini hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan ini dapat dijelaskan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada.

Berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus terdapat dua sarjana yang menguraikan definisi politik yaitu Rod Hague dan Andrew Heymood. Menurut Rod Hague et

al.: “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (*Politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members*).” (Hague et al, 1998)

Selanjutnya adalah Andrew Heywood: “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*).” (Heywood, 1997)

Oleh sebab itu dalam ilmu politik terdapat lima konsep yaitu: politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*) pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*). Berikut ini penjelasan mengenai lima konsep tersebut:

a. Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik (*politics*), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkungannya. Pendekatan ini dinamakan Pendekatan Institusional (*Institutional approach*).

Menurut Roger F. Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics* mengatakan: “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara...dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antarnegara (*Political science is the study of the state, its aim and purposes...the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state*).” (Soltau, 1961)

Menurut J. Barents, dalam Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat....dengan negara sebagai bagiannya (*en maatschappelijk leven... waarvan de staat een onderdeel vormt*); ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya (*De wetenschap der politiek is de wetenschap die het*

leven van de staat een onderdeel vormt. Aan het onderzoek van die staten, zoals ze werken, is de wetenschap der politiek gewijd) (Barents, 1965).

b. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini, yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkungannya dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan kaum militer. Pendekatan ini lebih dinamis daripada pendekatan institusional karena memerhatikan proses.

Menurut Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam *Power and Society*: “Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.”

Sedangkan menurut W.A. Robson, dalam *The University Teaching of Social Sciences*, mengatakan: “Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, . . yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik.... tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu (*Political science is concerned with the study of power in a society... its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest of the political scientist... centres on the struggle to gain or retain power, to exercise power or influence over others, or to resist that exercise*).” (Robson, 1954).

Deliar Noer dalam *Pengantar ke Pemikiran Politik* menyebutkan: “Ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern inilah memang kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara (Noer, 1965).

Selanjutnya Ossip K. Fletchteim dalam *Fundamental of Political Science* menegaskan: “Ilmu Politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh

negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat memengaruhi negara (*Political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it a power organization and the nature and purpose of other unioicial power phenomena that are apt to influence the state*).” (Fletchteim, 1952). Fletchteim juga menekankan bahwa kekuasaan politik dan tujuan politik saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain.

c. **Pengambilan Keputusan**

Keputusan (*decision*) adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (*decision making*) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah.

Aspek di atas juga banyak menyangkut soal pembagian (*distribution*) yang oleh Harold D. Laswell dirumuskan sebagai *who gets what, when and how*.

Joyce Mitchell, dalam bukunya *Political Analysis and Public Policy* mengatakan: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya (*Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society*).” (Mitchell, 1969)

Karl W. Deutsch berpendapat: Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (*Politics is the making of decisions by public means*) (Deutsch, 1972). Dikatakan selanjutnya bahwa keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan pribadi oleh seseorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan semacam itu merupakan sektor umum atau sektor publik (*public sector*) dari suatu negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai (*public goods*), yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa. Dalam arti ini politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah. Oleh Deutsch dan kawan-kawan negara dianggap sebagai kapal, sedangkan

pemerintah bertindak sebagai nakhodanya. Pendekatan ini berdasarkan cybernetika (*cybernetics*), yaitu ilmu komunikasi dan pengendalian (*control*).

d. Kebijakan Umum

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*public policy, beleid*), menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Berikut ini ada beberapa definisi:

Hoogerwerf menyatakan bahwa obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (*public policy*) di sini menurut Hoogewerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middel van machtsuitoefening*) (Hoogerweft, 1972).

Sedangkan David Easton menyatakan bahwa Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of the making of public policy*). David Easton dalam buku *The Political System* menyatakan, Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat (*Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society*) (Easton, 1971).

e. **Pembagian Kekuasaan**

Pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*) ialah pembagian dan penjabaran nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.

Dalam ilmu sosial, suatu nilai (*value*) adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian (*judgement*) atau suatu asas seperti misalnya kejujuran, kebebasan berpendapat dan kebebasan mimbar. Nilai juga bisa bersifat konkret (*material*) seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya.

Harold D. Laswell dalam buku *Who Gets What, When, How* mengatakan: "Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana." (Laswell, 1959).

David Easton, dalam *A Systems Analysis of Political Life*, mengatakan, "Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat (*a political system can be designated as those interactions through which values are authoritatively allocated for a society*)." (Easton, 1965)

C. **Bidang-Bidang Ilmu Politik**

Dalam *Contemporary Political Science* (UNESCO, 1950), Ilmu politik dibagi menjadi empat bidang utama yaitu:

- I. Teori politik yang terdiri dari teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik.
- II. Lembaga-lembaga politik yang terdiri dari UUD, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan perbandingan lembaga-lembaga politik.
- III. Partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum terdiri dari partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi dan pendapat umum.

IV. Hubungan internasional yang terdiri dari politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional.

a. Sejarah

Ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat, hal ini karena sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau dan inilah yang menjadi tujuannya, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke depan (*future oriented*): Bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah, teristimewa sejarah kontemporer, oleh sarjana Ilmu politik hanya dipakai untuk menemukan pola-pola ulangan (*recurrent patterns*) yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi masa depan. Sarjana ilmu politik tidak puas hanya dengan mencatat sejarah, tetapi ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik (*patterns of political behavior*) yang memungkinkannya untuk, dalam batas-batas tertentu, menyusun suatu pola perkembangan untuk masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan dapat diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.

Di Indonesia mempelajari sejarah dunia dan sejarah Indonesia khususnya merupakan suatu keharusan. Sejarah dipelajari untuk ditarik pelajarannya, agar dalam menyusun masa depan tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama. Misalnya, perlu sekali mempelajari revolusi-revolusi yang mengguncangkan dunia, seperti Revolusi Prancis, Amerika, Rusia, dan China, agar gejala revolusi yang telah dialami sendiri dapat lebih mengerti dan menarik manfaatnya. Demikian juga, misalnya, perlu mempelajari faktor-faktor yang mendorong Partai Komunis Indonesia (PKI) menyelenggarakan Pemberontakan Madiun pada tahun 1948 dan Gerakan 30 September pada tahun 1965, agar peristiwa-peristiwa tersebut dapat dihindarkan di masa depan.

Usaha untuk meneliti sejarah kontemporer secara ilmiah tentu saja masih terbatas. Sarjana ilmu politik asing banyak menulis mengenai sejarah kontemporer Indonesia, seperti misalnya George Mc. T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, yang membahas masa revolusi 1945 sampai pengakuan kedaulatan pada tahun 1949; Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, yang membahas masa 1949 sampai 1959; dan Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy*, yang membahas masa peralihan ke

Demokrasi Terpimpin. Terdapat juga tokoh-tokoh yang fokus pada penulisan sejarah secara memoar (kenangan- kenangan), seperti Sukarno, *An Autobiography as told to Cindy Adams*; Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi*; Adam Malik, *Riwayat Proklamasi*; Sewaka, *Dari Zaman ke Zaman*; T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran*; dan sebagainya. Pada tahun 1976 dibawah pimpinan Sartono Kartodirdjo menerbitkan *Sejarah Nasional Indonesia* dan pada tahun 2006 buku *Menjadi Indonesia*, tulisan Parakitri T. Simbolon.

b. Filsafat

Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (*universe*) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: Apakah asas-asas yang mendasari fakta? Apakah yang dapat saya ketahui? Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya. Ilmu politik terutama sekali erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai (*value*) dari negara. Negara dan manusia didalamnya dianggap sebagai sebagian dari alam semesta.

Dalam pandangan filsuf Yunani Kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral filosofi atau etika (*ethics*). Etika membahas persoalan yang menyangkut norma-norma baik/buruk seperti misalnya tindakan apakah yang boleh dinamakan baik/buruk, manusia apakah yang boleh dinamakan manusia baik/buruk; apakah yang dinamakan adil/tidak adil. Penilaian semacam ini, jika diterapkan pada politik menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: apakah seharusnya tujuan dari negara; bagaimana seharusnya sifat sistem pemerintahan yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut; bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan negara dan warganya. Dengan demikian kita sampai pada bidang filsafat politik yang membahas masalah politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai (*value system*) dan norma-norma tertentu.

Contoh dari pandangan bahwa ada hubungan erat antara politik dan etika tercermin dalam karangan filsuf Yunani Plato, *Politeia*, yang menggambarkan negara yang ideal. Di negara-negara Barat pemikiran politik baru memisahkan diri dari etika mulai abad ke-1 dengan dipelopori oleh negarawan Itali Niccolo Macchiavelli. Akan tetapi di dunia Barat akhir-akhir ini kembali timbul perhatian baru tentang filsafat dengan munculnya buku *A Theory of Justice*,

karangan John Rawls tahun 1971. Rawls memperjuangkan distribusi kekayaan secara adil (*equity*) bagi pihak yang kurang mampu (Rawls, 1971).

c. Hubungannya dengan Ilmu-Ilmu Sosial Lain

Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai obyek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok (*group*). Mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama.

Cara penglihatan ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tersendiri, tetapi selalu hidup dalam suatu komunitas. Gagasan bahwa secara mutlak manusia merupakan anggota kelompok (*group*) bukanlah- penemuan baru. Sejak kira-kira tahun 400 S.M. filsuf Yunani Aristoteles berkata bahwa manusia merupakan *zoon politikon* (makhluk sosial atau makhluk politik) dan bahwa manusia yang hidup tersendiri adalah dewa atau binatang.

Sosiologi

Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi adalah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratiikasi sosial memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan (*policy decisions*), corak dan sifat keabsahan politik (*political legitimacy*), sumber-sumber kewenangan politik (*sources of political authority*), pengendalian sosial (*social control*), dan perubahan sosial (*social change*).

Antropologi

Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula antropologi lebih banyak

memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Lambat laun antropologi dan sosiologi saling memengaruhi baik dalam obyek penelitian maupun dalam pembinaan teori, sehingga pada saat ini batas antara kedua ilmu sosial tadi telah menjadi kabur.

Ilmu Ekonomi

Pada masa silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik (*political economy*), yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman, pada abad ke-18 dan ke-19. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap perilaku manusia yang berbeda-beda: ilmu politik (*political science*) dan ilmu ekonomi (*economics*).

Psikologi Sosial

Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Jika sosiolog mempelajari kegiatan kehidupan sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi ekstern (lingkungan sosial, isik, peristiwa-peristiwa, dan gerakan massa) maupun dari segi intern (kesehatan isik perorangan, semangat, dan emosi). Dengan menggunakan kedua macam analisis ini, ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan peran besar itu. Ia menjelaskan bagaimana teknik brainwashing dalam propaganda dan indoktrinasi politik serta faktor-faktor yang membangkitkan berkembangnya pemimpin kharismatis memengaruhi proses politik pada umumnya.

Geografi

Faktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis (*strategic frontiers*), desakan penduduk (*population pressure*), daerah pengaruh (*sphere of influence*) memengaruhi politik. Montesquieu, seorang sarjana Prancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor geografi memengaruhi konstelasi politik suatu negara.

Ilmu Hukum

Di negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang (*law enforcement*) merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya menyoal negara ialah hukum tata-negara (*Staatsrecht, public law*) dan ilmu negara (*Staatslehre, general theory of the state*).

Kegiatan Pembelajaran 2

A. Konsep-Konsep Politik

Konsep merupakan unsur penting dalam penelitian dan digunakan oleh peneliti untuk lebih memahami dan mengerti dunia sekelilingnya. Dalam ilmu politik dikenal beberapa konsep yang disebut konsep politik. Para filsuf politik mencari esensi dari konsep politik seperti kebenaran, hukum atau keadilan. Sedangkan para sarjana politik modern cenderung melihat konsep-konsep seperti: masyarakat, negara, sistem politik, pemerintah, kekuasaan, legitimasi, dalam lain-lain.

a. Teori Politik

Dalam teori politik yang dibahas adalah masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory* terdapat dua macam teori politik (Jenkin, 1967), yaitu:

- 1) Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik (*norms for political behavior*). Dengan adanya

unsur norma-norma dan nilai (*values*) ini maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai (*valuational*). Termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.

- 2) Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non-*valuational* (*value-free*), biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

b. Masyarakat

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antarmanusia. Robert M. MacIver mengatakan: “Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*Society means a system of ordered relations*).” (MacIver, 1961).

Anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil, misalnya, masyarakat kelompok etnis Batak di Sumatera Utara, atau suatu masyarakat yang lebih luas *nation state* seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat seperti ini anggota masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan faktor agama, dan/atau etnis.

Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Harold Laswell, dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya (masyarakat Barat), merinci sedikitnya terdapat delapan nilai (Laswell, 1972), yaitu:

- 1) Kekuasaan (*power*)
- 2) Kekayaan (*wealth*)
- 3) Penghormatan (*respect*)
- 4) Kesehatan (*wellbeing*)
- 5) Kejujuran (*rectitude*)
- 6) Keterampilan (*skill*)

7) Pendidikan/Penerangan (*enlightenment*)

8) Kasih sayang (*affection*)

Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu, maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus.

c. Negara

Roger H. Soltau: “Negara adalah agen (*agency*) atau kewewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (*The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*).” (Soltau, 1961).

Harold J. Laski: “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (Laski, 1947).

Max Weber: “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah (*The state is a human society that (succesfully) claims the monopoli of the legitimate use of physical force within a given territory*) Mills, 1958).

Robert M. Maclver: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (*The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order*) (Maclver, 1926).

Dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan

pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah.

Negara umumnya memiliki tiga sifat utama yaitu: **Pertama**, sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan isik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. **Kedua**, sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. **Ketiga**, sikap mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

Negara terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut:

1) Wilayah

Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya.

2) Penduduk

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme

3) Pemerintah

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain.

4) Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya.

Selanjutnya negara memiliki beberapa fungsi yaitu: melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan dan menegakkan keadilan

d. Kekuasaan

kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sumber daya kekuasaan tertentu untuk mempengaruhi tingkah laku seorang atau sekelompok orang lain untuk orang atau kelompok tersebut bertingkah laku seperti keinginan atau tujuan pihak yang memiliki kemampuan. Negara sebagai organisasi yang memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup semua ini memerlukan kekuasaan untuk memenuhi sifat-sifat tersebut.

Menurut Keith Boulding dalam bukunya *Three Faces of Power* (1989) melihat bahwa kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan memiliki beberapa bentuk yaitu:

- 1) Pengaruh berupa loyalitas dan komitmen.
- 2) Pertukaran keuntungan berupa kesepakatan.
- 3) Kekuatan sebagai kekuasaan dalam bentuk kekerasan (paksaan atau intimidasi).

Robert Dahl dalam bukunya *The Concept of Power* (1957) melihat kekuasaan sebagai konsep pokok dan mengatakan: "A mempunyai kekuasaan atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan (*A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do*).” (Dahl, 1957).

Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, dalam bukunya *Modern Political Analysis* yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1963, Dahl memakai perumusan yang persis sama dengan yang dipakainya dalam tulisan terdahulu, Namun istilah "kekuasaan" diganti dengan istilah "pengaruh". Dengan demikian definisinya berbunyi: "A mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan" (*A has*

influence over B to the extent that the can get B to do something that B would not otherwise do). Pada tahun 1978, dalam edisi ketiga dari buku yang sama, Dahl mengatakan bahwa kekuasaan adalah salah satu *influence term*.

Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang, dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi masih terbuka alternatif lain untuk bertindak. Akan tetapi, sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan, ia kadang-kadang mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering kali cukup berhasil.

e. Legitimasi

Terdapat beberapa pengertian yang berhubungan erat dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy* atau keabsahan). Robert Bierstedt dalam karangannya *An Analysis of Social Power* yang mengatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power and Society*, wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*), bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Sedangkan Max Weber (1864-1922), seorang sosiolog menyatakan terdapat tiga macam wewenang, yaitu tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Hitler dan Mao Zedong sering dianggap sebagai pemimpin kharismatik, sekalipun tentu mereka juga memiliki unsur wewenang rasional-legal. Wewenang rasional-legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Yang ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya.

Dalam suatu sistem politik, konsep legitimasi sangat penting, legitimasi adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara

luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah. Jadi, mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah wajar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa dipatuhi.

David Easton menyatakan legitimasi adalah: "Keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu (*The conviction on the part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime*).

A.M. Lipset menyatakan bahwa Legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat. (*Legitimacy includes the capacity to produce and maintain a belief, that the existing political institutions or forms are the most appropriate for the society*). (Lipset, 1960).

Jika dalam suatu sistem politik terdapat konsensus mengenai dasar-dasar dan tujuan-tujuan masyarakat, legitimasi dapat tumbuh dengan kuat, sehingga unsur paksaan serta kekerasan yang dipakai oleh setiap rezim dapat ditetapkan sampai minimum. Maka dari itu pimpinan dari suatu sistem politik akan selalu mencoba membangun dan mempertahankan legitimasinya di kalangan masyarakat karena hal ini merupakan dukungan yang paling utama.

B. Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik

Ilmu politik dalam perjalanannya mengalami perkembangan dengan munculnya berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain: Pendekatan Legal (yudiris) dan Institusional telah disusul dengan Pendekatan Perilaku, Pasca-Perilaku, dan Pendekatan Neo-Marxis. Kemudian muncul dan berkembang pendekatan lain seperti Pilihan Rasional, Teori Ketergantungan dan Institusionalisme Baru.

a. Pendekatan Legal/Institusional

Pendekatan Legal/Institusional atau pendekatan tradisional, berkembang abad ke-19 sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus utama, terutama segi konstitusional dan yuridisnya yang menyangkut sifat dari undang-undang dasar, masalah

kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif.

Pendekatan tradisional dalam membahas parlemen misalnya hanya akan fokus pada kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya seperti tertuang dalam naskah-naskah resmi (undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan tata tertib); hubungan formal dengan badan eksekutif; struktur organisasi (pembagian dalam komisi, jenjang-jenjang pembicaraan) atau hasil kerjanya (berapa undang-undang telah dihasilkan). Pendekatan tradisional tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbentuk dan berfungsi seperti yang dirumuskan dalam naskah-naskah resmi, apalagi bertanya mengapa ada diskrepansi antara struktur formal dan gejala-gejala yang dapat diamati dalam praktik. Dan disaat yang bersamaan, pendekatan tradisional tidak menghiraukan organisasi-organisasi informal, seperti kelompok kepentingan dan kelompok lainnya, dan juga media komunikasi. Bahasan ini lebih bersifat statis dan deskriptif daripada analitis, dan banyak memakai ulasan sejarah.

Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif (yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu) dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi Barat. Contoh dari pendekatan ini adalah karya R. Kranenburg, yang berjudul *Algemene Staatsleer*, di Indonesia dengan judul *Ilmu Negara Umum*. Bahasan dalam pendekatan ini terbatas pada negara-negara demokrasi Barat, seperti Inggris, Amerika, Prancis, Belanda, dan Jerman. Sehingga dapat dipahami bahwa pendekatan ini kurang memberi peluang bagi terbentuknya teori-teori baru.

Pada tahun 1930-an beberapa sarjana di Amerika Serikat mulai mengemukakan suatu pandangan yang melihat politik sebagai kegiatan atau proses, dan negara sebagai sarana perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sarjana-sarjana dari Mazhab Chicago (*Chicago School*) antara lain tersebut nama Charles E. Merriam dengan karyanya, *Political Power: Its Composition and Incidence* (1934), dan Harold D. Laswell dengan bukunya, *Politics: Who Gets What, When, How* (1936). Esensi dari politik adalah kekuasaan, terutama kekuasaan untuk menentukan kebijakan publik. Gerakan ini sedikit banyak mempengaruhi pendekatan tradisional, meskipun nuansa ini masih terbatas di Amerika saja.

b. Pendekatan Perilaku dan Pendekatan Pasca-Perilaku

Pendekatan Perilaku mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia II. Pendekatan ini muncul karena sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak

memuaskan, karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kemudian terdapat kekhawatiran bahwa, jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, maka ketinggalan dari ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokohnya Max Weber (1864-1920) dan Talcott Parsons (1902-1979), antropologi, dan psikologi. Selanjutnya, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik.

Pemikiran pokok pendekatan ini tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena pembahasan ini tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat untuk mempelajari perilaku (*behavior*) manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku bisa pada individu, dan kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elite, gerakan nasional, atau suatu masyarakat politik (*polity*).

Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. Jika penganut pendekatan ini mempelajari parlemen, maka yang dibahas adalah perilaku anggota parlemen seperti pola pemberian suaranya (*voting behavior*) terhadap rancangan undang-undang, pidato-pidato, proses pembuatan rancangan undang-undang, interaksi dengan teman sejawat, kegiatan *lobbying*, dan latar belakang sosialnya.

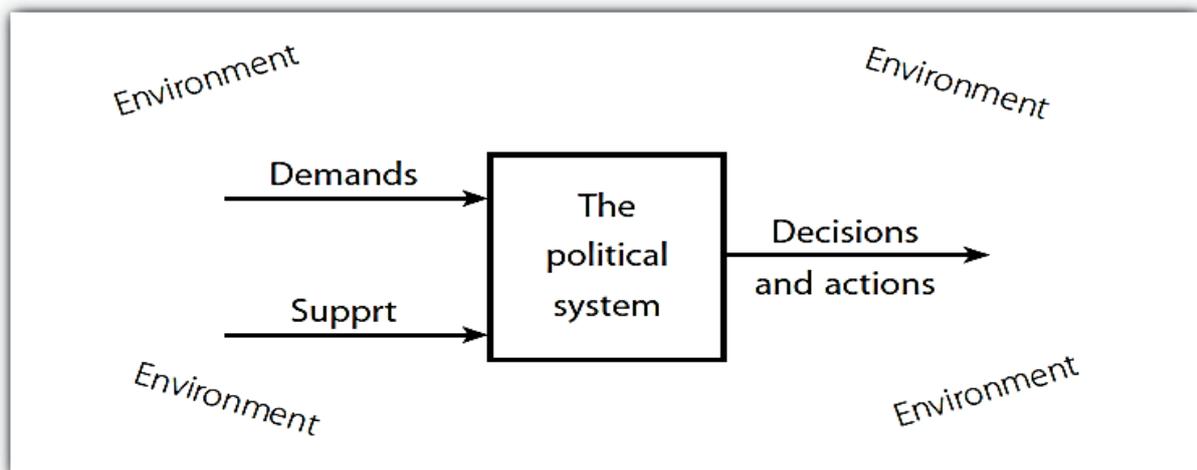
Pendekatan perilaku memiliki ciri khas yang revolusioner yaitu suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Orientasi ini mencakup beberapa konsep pokok, yang oleh David Easton (1962) dan Albert Somit (1967), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Menampilkan keteraturan (*regularities*).
2. Membedakan secara jelas antara norma (ideal atau standar sebagai pedoman untuk perilaku) dan fakta (sesuatu yang dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan dan pengalaman).
3. Analisis politik bebas-nilai (*value-free*), tidak dipengaruhi nilai-nilai pribadi peneliti.
4. Penelitian bersifat sistematis dan menuju pembentukan teori (*theory building*).
5. Ilmu politik harus bersifat murni (*pure science*); kajian terapan yaitu mencari penyelesaian masalah (*problem solving*) dan menyusun rencana perbaikan.

Selain itu, muncul penelitian mengenai rekrutmen politik, kepemimpinan, masalah keterwakilan (*representation*), sosialisasi politik, struktur kekuasaan dalam suatu komunitas, kebudayaan politik, konsensus dan konflik, komposisi sosial dan elite politik. Sarjana-sarjana dalam Pendekatan Perilaku adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture* (1962), suatu studi yang mempelajari kebudayaan politik di lima negara demokrasi. Dua puluh tahun kemudian studi ini ditinjau kembali oleh sarjana-sarjana yang sama dan hasilnya diterbitkan dengan judul *Civic Culture Revisited* (1980).

Salah satu ciri khas Pendekatan Perilaku ini ialah pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial, dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Dalam suatu sistem, bagian-bagiannya saling berinteraksi, saling bergantung, dan semua bagian bekerja sama untuk menunjang terselenggaranya sistem itu. Sistem mengalami stress dari lingkungan, tetapi berusaha mengatasinya dengan memelihara keseimbangan. Dengan demikian sistem dapat bertahan (*persist*).

Bagan 1 Sistem Politik David Easton



Sumber: Easton, 1965

Salah satu pelopor Pendekatan Perilaku ini ialah Gabriel Abraham Almond, di samping sarjana seperti David Easton, Karl Deutsch, Robert Dahl, dan David Apter. Gabriel Almond berpendapat bahwa semua sistem mempunyai struktur (institusi atau lembaga), dan unsur-unsur dari struktur ini menyelenggarakan beberapa fungsi. Fungsi ini bergantung pada sistem dan juga bergantung pada fungsi-fungsi lainnya. Konsep ini sering disebut pandangan structural functional.

Sistem politik menyelenggarakan dua fungsi, yaitu fungsi masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Keduanya terpengaruh oleh sifat dan kecenderungan para aktor politik. Menurut

Almond ada lebih dari empat fungsi input dan tiga fungsi output. Input ialah sosialisasi politik dan rekrutmen, artikulasi ke penangan, himpunan kepentingan (*interest aggregation*), dan komunikasi politik. Kemudian dalam perkembangannya Almond mengubah istilahnya menjadi tiga fungsi, yakni fungsi kapasitas (*capacity function*), fungsi konversi dan pemeliharaan (*conversion and maintenance function*), dan fungsi adaptasi (*adaptation function*). Sementara itu, komunikasi dianggap sebagai cara untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi itu. Sedangkan ada tiga fungsi output, yaitu membuat peraturan (*rule making*), mengaplikasikan peraturan (*rule application*), dan memutuskan (secara hukum) peraturan (*rule adjudication*). Konsep ini dijabarkan lagi oleh David Easton (1965) khusus untuk sistem politik melalui analisis sistem, dalam bukunya *A Systems Analysis of Political Life* (Easton, 1965).

Ia mengutarakan bahwa dalam suatu sistem politik (atau negara) selalu ada suatu aliran (low) terus-menerus dari input ke output dan bolak-balik. Input terdiri atas tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkungan. Sistem politik yang terdiri dari pembuat keputusan dan aktor-aktor politik lainnya, menerima input ini dan mempertimbangkan reaksi terhadap kebijakan-kebijakannya. Informasi tadi dikonversikan dalam suatu *black box* yang terdiri dari institusi-institusi politik dan menghasilkan output dalam bentuk peraturan serta keputusan otoritatif. Output ini kembali lagi ke lingkungan melalui suatu lingkaran umpan balik (*feedback loop*) dan ini menjadi input baru bagi sistem politik. Selalu terjadi suatu proses mencari keseimbangan (*equilibrium*). Proses ini terus berlanjut dan sistem politik dapat bertahan (*persist*), melalui suatu proses yang dinamis. Di kemudian hari, David Easton mengaku bahwa pemerintah tidak hanya menerima desakan dari luar, tetapi juga dari sistem itu sendiri yang dinamakan *with input*, misalnya desakan dari partai politik atau departemen kabinet.

Kritik terhadap Pendekatan Perilaku datang dari kalangan tradisionalis, kalangan penganut Pendekatan Perilaku sendiri, dan juga dari para Neo-Marxis. Para sarjana tradisionalis seperti Eric

Voegelin, Leo Strauss, dan John Hallowell menyerang Pendekatan Perilaku dengan argumentasi bahwa pendekatan itu terlalu steril karena menolak masuknya nilai-nilai (*value-free*) dan norma-norma dalam penelitian politik. Menurut kalangan tradisionalis, mereka yang berada di balik Pendekatan Perilaku tidak mengusahakan mencari jawaban atas pertanyaan yang mengandung nilai, seperti apakah sistem politik demokrasi yang baik, atau bagaimana membangun masyarakat yang adil, dan sebagainya.

Pendekatan Perilaku dianggap tidak mempunyai relevansi dengan realitas politik dan terlalu banyak memusatkan perhatian pada masalah yang kurang penting, seperti survei mengenai perilaku pemilih, sikap politik, dan pendapat umum. Lagi pula pendekatan ini tidak peduli atau buta terhadap masalah-masalah sosial yang gawat seperti konflik dan pertentangan-pertentangan pada saat itu yang mengguncangkan masyarakat. Secara sinis dikatakan bahwa para sarjana perilaku atau behavioralis ini bermain biola pada saat Roma dibakar. Dengan demikian mereka telah mengorbankan relevansi untuk tercapainya kecermatan yang steril.

Perbedaan antara para tradisionalis dengan para behavioralis adalah sebagai berikut: Para tradisionalis menekankan nilai-nilai dan norma-norma, maka para behavioralis menekankan fakta. Jika para tradisionalis menekankan segi ilisafat, maka para behavioralis menekankan penelitian empiris. Jika para tradisionalis memperjuangkan ilmu yang bersifat terapan, maka para behavioralis memperjuangkan perlunya ilmu bersifat murni. Jika para tradisionalis menonjolkan aspek historis-yuridis, maka para behavioralis mengutamakan aspek sosiologis-psikologis. Jika para tradisionalis memilih metode kualitatif, maka para behavioralis lebih mementingkan metode kuantitatif.

Namun demikian, pada tahun 1960-an, di mana permasalahan diskriminasi ras, perlombaan senjata dan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Beberapa sarjana Pendekatan perilaku menyadari kegagalan untuk meramalkan atau mengatasi keresahan ini, mereka memberikan kritik dan melakukan koreksi terhadap pendekatan ini. Selain menunjukkan kelemahan-kelemahan, mereka juga mengingatkan perlunya meningkatkan mutu ilmiah ilmu politik. Para sarjana ini disebut sebagai ilmuan Pasca-Perilaku di mana pemikiran mereka banyak dipengaruhi tokoh-tokoh Marxis seperti Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre.

David Easton sebagai salah satu pelopor pendekatan perilaku dan pendukung pendekatan pasca-perilaku mengekspresikan kritiknya tentang pendekatan perilaku. Menurutnya ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan dengan masalah sosial, pendekatan perilaku bersifat konservatif lebih menekankan kestabilan dari pada memperhatikan gejala perubahan, ilmu tidak boleh bebas nilai dalam evaluasinya dan nilai-nilai tidak boleh dihilangkan, terutama nilai-nilai kemanusiaan, ilmuan harus memiliki komitmen untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan berorientasi aksi.

c. Pendekatan Neo-Marxis

kelompok Neo-Marxis berbeda dengan kelompok Marxis Klasik. Kelompok Marxis Klasik lebih dekat dengan komunisme, sedangkan kelompok Neo-Marxis mendapat inspirasi dari tulisan-tulisan yang dibuat oleh Marx di masa mudanya. Kebanyakan sarjana dari kelompok ini tidak bergabung dengan partai politik atau aktif dalam kegiatan politik praktis, meskipun ada kelompok kecil yang militan misalnya kelompok *Kiri-baru*. Tokoh yang tulisannya memberikan inspirasi adalah George Lukacs (1885-1971).

Kelompok Neo-Marxis sangat kritis terhadap komunisme dan kapitalis. Mereka menolak sifat represif dan teror dari rezim komunis di Uni Soviet dan tidak memperlakukan tafsir Lenin dan Stalin yang merupakan satu-satunya tafsir layak dari pemikiran Marx. Sarjana ini kecewa dengan para sosial demokrat yang meskipun berhasil meningkatkan keadilan lewat negara kesejahteraan namun gagal menghapuskan kesenjangan sosial lain dalam masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi.

Reaksi para sarjana ini adalah dengan berpaling (kembali) pada tulisan-tulisan Marx saat muda. Di mana sejumlah ramalan Marx terbukti tidak benar, kapitalisme tidak runtuh dan bahkan komunisme mengembangkan unsur-unsur totaliterisme yang represif seperti yang dikritisi oleh penganut Neo-Marxis dengan menyusun teori baru dengan menggunakan naskah asli pemikiran Marx.

Analisis Neo-Marxis mengenal bahwa keseluruhan gejala sosial merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lain, terutama keterkaitan antara politik dan ekonomi. Ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam politik tetapi bukan satu-satunya penentu politik. Fokusnya adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara, dengan penekanan pada kegiatan negara dan konflik kelas. Negara merupakan instansi yang paling berkuasa dan mendominasi kehidupan politik dan konflik kelas merupakan proses dialektis penting yang mendorong perkembangan masyarakat.

Neo-Marxis melihat konflik antar kelas seperti konflik etnis, agama atau rasial, langsung tidak langsung berhubungan erat dengan konflik kelas. Konflik kelas ini tidak terjadi diantara pemilik alat produksi dengan yang tidak memiliki, namun diantara mereka yang memiliki banyak fasilitas. Selain latar belakang sosial dan pendidikan yang sama, kelas dominan juga memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang sama. Dan negara yang mendukung hal ini akan membuat dominasi kelas semakin kuat dan mereka tidak segan-segan menggunakan paksaan, konsesi, persuasi untuk mencegah kelas lain melawan dominasi

mereka. Dengan demikian, menurut kelompok Neo-Marxis, konflik ini bisa tidak terlihat dan apa yang terlihat sebagai harmoni adalah semu dan menyesatkan.

Kelompok Neo-Marxis menyumbang pemikiran bahwa dominasi kelas harus diganti dengan transformasi total dengan menghapus ketidakadilan dan membentuk tatanan masyarakat yang memenuhi kepentingan rakyat, tidak hanya kepentingan kaum borjuis. Di bidang politik, harus ada desentralisasi kekuasaan dan adanya partisipasi politik bagi semua komunitas. Pemikiran ini menimbulkan kepekaan terhadap hal-hal yang tidak terlihat, yang ada di permukaan, yang sulit diamati dan diukur.

Sarjana yang mengembangkan Neo-Marxis adalah *Frankfurter Schule* di Perancis dan *Mazhab Frankfurt* didirikan di Jerman tahun 1923 dan pindah ke New York selama Perang Dunia II. Mereka mengembangkan pemikiran yang dikenal dengan Teori Kritis (*Critical Theory*), dan fokus studinya pada soal kesadaran pada dimensi subjektif serta psikologis terutama psiko-analisis. Tokohnya antara lain Marx Horkheimer (1895-1973), Theodor Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1929-1979) dan Jurgen Habermas. Sedangkan kelompok yang berkembang di Perancis menfokuskan pada ilmu sosiologi, filsafat, ekonomi dan sejarah. Tokohnya seperti Jean P. Sartre (1905-1980), Louis Althusser (1918-1990), Ralph Milliband, Steven Lukacs, Nicolas Paulantzas dan J.J. O'Connor.

Neo-Marxis mendapatkan beberapa kritik antara lain: *Pertama*, mereka dianggap tidak membentuk teori baru. *Kedua*, kurang melakukan penelitian empirik. *Ketiga*, mereka muncul sebagai ciptaan teoretisi sosial dari kampus dan dicap sebagai sosiologi borjuis.

d. Teori Ketergantungan

Teori Ketergantungan berasal dari kelompok yang memfokuskan penelitiannya pada hubungan antara negara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga. Kelompok ini menarik perhatian besar pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an, tetapi sebenarnya pada tahun 1900-an sudah mulai dirintis, antara lain oleh Paul Baran, yang kemudian disusul oleh Andre Gunder Frank.

Bertolak dari konsep Lenin mengenai imperialisme, kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, tetapi dalam bentuk lain yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju (*underdeveloped*). Negara-negara maju memang telah melepaskan tanah jajahannya, tetapi tetap mengendalikan (mengontrol) ekonominya. Pembangunan yang dilakukan negara-negara yang kurang maju, atau Dunia Ketiga, hampir selalu berkaitan erat dengan kepentingan pihak Barat. *Pertama*, negara bekas

jajahan dapat menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Investasi negara-negara maju diuntungkan karena negara kurang maju dapat memberlakukan gaji atau upah yang kecil bagi tenaga kerjanya, sewa tanah yang rendah dan bahan baku yang murah. *Kedua*, negara kurang maju dapat menjadi pasar untuk hasil produksi negara maju, sedangkan produksi untuk ekspor sering ditentukan oleh negara maju. Eksploitasi ini menyebabkan negara kurang maju mengalami kemiskinan terus-menerus karena pengaruh strategi ekonomi dan politik dari negara maju, dan kemiskinan mencerminkan ketergantungan itu.

Pemikiran pelopor Teori Ketergantungan yang ekstrim adalah Andre Gunder Frank (tahun 1960-an) yang berpendapat bahwa penyelesaian masalah itu hanyalah melalui revolusi sosial secara global. Sementara penulis lain seperti Henrique Cardoso (1979) menganggap bahwa pembangunan yang independen ada kemungkinan terjadi, sehingga revolusi sosial tidak mutlak harus terjadi.

Sekalipun pendapat dari kalangan Teori Ketergantungan itu sendiri ada perbedaan satu sama lain, tapi dapat disebut beberapa variasi dalam istilah yang dipakai untuk menunjuk pada perbedaan antara negara kaya dan negara miskin, seperti *patronclient*, *centreperiphery*, *coreperiphery*, atau *centrehinterland*, *metropolitansatellite*. Sementara itu, istilah *world systems* model biasanya dihubungkan dengan nama Immanuel Wallerstein. Mereka berpendapat bahwa gejala ini sudah menjadi gejala seluruh dunia; mereka melihat adanya suatu rantai hubungan metropolitan-satelit (*chain of metropolitan-satellite*) dalam struktur sistem dunia yang melampaui batas-batas negara.

Yang menarik dari tulisan-tulisan kalangan pendukung Teori Ketergantungan (*dependencia*), yang pada awalnya memusatkan perhatian pada negara-negara Amerika Selatan, adalah pandangan mereka yang membuka mata kita terhadap akibat dari dominasi ekonomi ini. Ini bisa terlihat dari membubungnya utang dan kesenjangan sosial-ekonomi dari pembangunan di banyak negara Dunia Ketiga.

e. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan ini berangkat dari masalah ekonomi yang menjadi fokus dunia, di mana pembangunan ekonomi di banyak negara telah menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat serta meningkatkan hubungan perdagangan di antara negara-negara. Ekonomi ini mempengaruhi ilmu sosial lainnya termasuk ilmu politik, ekonomi politik merupakan bentuk perkembangan variasi analisis *rational choice*, *public choice* dan *collective choice*.

Analisisnya adalah melihat sifat dasar manusia sebagai makhluk rasional yang selalu mengejar kepentingan sendiri dan egois. Manusia harus membuat pilihan karena sumber daya yang terbatas, oleh karenanya disusun skala preferensi atas alternatif-alternatif yang tersedia. Pilihan ini ditentukan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal bagi manusia. Dan optimalisasi kepentingan dan efisiensi ini merupakan inti dan teori *rational choice*.

Pendekatan ini mendapatkan kritik terutama karena berkenaan dengan sifat dasar manusia, yaitu: *Pertama*, manusia tidak selalu rasional hal ini disebabkan faktor budaya, agama, sejarah dan moralitas. *Kedua*, pemikiran tentang individualistik dan materialistik manusia terlalu berlebihan, karena masih ada manusia yang bertindak untuk kepentingan orang lain dan peduli terhadap sesama manusia.

Namun demikian, pendekatan ini mendatangkan reaksi yaitu munculnya perhatian terhadap masalah keadilan, persamaan hak dan moralitas seperti yang disampaikan oleh John Rawls (1971) dalam bukunya *A Theory of Justice*. Bahwa keadilan dan persamaan bagi seluruh masyarakat khususnya yang tidak beruntung dilakukan oleh institusi politik. berikutnya meningkatnya perhatian untuk meningkatkan peran negara di masa modern. Munculnya reaksi ini menunjukkan adanya hal baru dalam studi politik yang berorientasi pada negara di mana sebelumnya pada masyarakat. Inilah awal dari hadirnya pendekatan Institusionalisme Baru.

f. Pendekatan Institusional Baru

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang muncul sebagai reaksi dari pendekatan pilihan rasional. Fokus utama dari pendekatan ini pada negara dan institusi-institusinya yang menentukan dan membatasi. Pendekatan ini menolak pandangan yang melihat negara sebagai institusi yang tidak bebas, yang ditentukan oleh massa lewat aktor-aktor politik mereka. Bagi pendekatan ini, negara sebagai institusi merupakan aktor yang independen dan tidak merepresentasikan kelas atau kelompok tertentu.

Dapat dikatakan bahwa suatu institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Menurut Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, institusi mencakup (1) Struktur fisik, (2) Struktur demografis, (3) Perkembangan historis, (4) Jaringan pribadi, dan (5) Struktur sementara (yaitu keputusan-keputusan sementara). Institusi adalah peraturan-peraturan yang stabil, yang memungkinkan

orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan bersama.

Mengapa timbul institusi dalam masyarakat? Manusia menyadari bahwa setiap warga mempunyai kepentingan sendiri; akan tetapi di samping itu ia meyakini pula bahwa ia juga mempunyai kepentingan bersama, seperti misalnya memiliki seperangkat perundang-undangan. Sudah mulai masa Yunani Kuno (\pm 500 S.M), baik Athena (Draco) maupun Sparta (Lycurgus), mempunyai *law givers* (penyusun undang-undang) untuk mengatur kehidupan mereka. Warga masyarakat menginginkan peraturan-peraturan itu dilaksanakan dan untuk itu mereka membentuk beberapa institusi untuk melaksanakan kepentingan kolektif itu, antara lain pemerintah. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa "Politik adalah cara bagaimana manusia mengatur diri sendiri." Maka timbullah bermacam-macam institusi; ada yang membuat peraturan, ada yang melaksanakan peraturan, ada yang memberi hukuman kepada mereka yang melanggar peraturan itu. Parlemen, konstitusi, pemerintah, birokrasi, sistem partai, sistem peradilan, *civil society*, dan sebagainya disebut sebagai institusi politik.

Institusi-institusi memengaruhi dan menentukan cara para aktor berusaha mencapai tujuannya. Institusi menentukan: (a) siapa aktor yang sah (b) jumlah aktor (c) siapa menentukan tindakan. Institusi memberi stabilitas, sebab tidak dapat diubah begitu saja. Institusi mempunyai kekuasaan yang sedikit banyak otonom dan para aktor yang ingin mengubah institusi tertentu akan mempertimbangkan akibat-akibat yang sering tidak dapat diramalkan.

Pendekatan ini menjadi sangat penting bagi negara-negara yang baru membebaskan diri dari cengkeraman suatu rezim yang otoriter serta represif. Dalam proses ini nilai kembali memainkan peran penting. Pokok masalah utama bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Dalam usaha menentukan institusi yang terbaik terjadi wacana dalam masyarakat mengenai cara bagaimana mengubah institusi yang ada agar menjadi lebih demokratis.

Jadi fokus pendekatan ini pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, pasar dan globalisasi ketimbang pada masalah konstitusi yuridis. Dapat dikatakan bahwa ilmu politik, dengan mengembalikan fokus atas negara termasuk aspek legal/institusionalnya, telah mengalami suatu lingkaran penuh (*full circle*).

Latihan

Kegiatan Pembelajaran 1

1. Jelaskan pengertian negara, kekuasaan pengambilan keputusan, kebijakan umum dan pembagian kekuasaan?
2. Jelaskan secara singkat sejarah politik dan filsafat?
3. Jelaskan secara singkat hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya?

Kegiatan Pembelajaran 2

1. Sebutkan dan jelaskan konsep-konsep dalam politik!
2. Sebutkan dan jelaskan pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik!

Daftar Pustaka

- Andrain, Charles F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Barents, J. (1965). *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*. Terjemahan L.M. Sitorus. Jakarta: P.T. Pembangunan. Terjemahan dari *De Wetenschap der Politiek: Een Terreinverkenning*, J. Barents. 's Gravenhage: A. A. M. Stols, 1952.
- Budiardjo, Miriam. (1984). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Sinar Harapan.
- _____. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam, Nuri Suseno, Rosa Evaquarta, Panji Anugrah. (2014). *Pengantar Ilmu Politik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Chilcote, Ronald H. (1981). *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*. Boulder: Westview Press.
- Dahl, Robert A. (1957). *The Concept of Power*. Behavioral Science.
- _____. (1980). *Analisis Politik Modern*. Jakarta: Dewaruci Pers.
- Deutsch, Karl. W. (1970). *Politics and Government: How People Decide Their Fate*. Boston: Houghton.Milin Company.
- Easten, David. (1965). *A System Analysis of Political Life*. New York: John Wiley and Sons.
- _____. (1991). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. Ed. Ke-2. New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Fletchtem, Ossip K., ed. (1952). *Fundamental of Political Science*. New York: Ronald Press Co.
- Hague, Rod, et al. (1998). *Comparative Government and Politics*. Ed. ke-4. London: Macmillan Press.

- Heywood, Andrew. (1997). *Politics*. Hampshire: Palgrave.
- _____. (2000). *Key Concepts in Politics*. Hampshire: Palgrave.
- Holmes, Leslie. (1997). *Postcommunism An Introduction*. Cambridge: Politiy Press.
- Hoogerwerf, A. (1972). *Politicoe: Begrippen en Problemen*. Alpena an den Rijn: Samson Uitgeverij.
- Jenkin, Thomas P. (1967). *The Study of Political Theory*. New York: Random House, Inc.
- Laski, Harold J. (1947). *The State in Theory and Practice*. New York: The Viking Press.
- Laswell, Harold D. (1972). *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: Meridian Books, Inc.
- Lipset, Seymour Martin. (1960). *Political Man: The Social Bases of Politics*. Bombay: Vakila, Fefer and Simons Private, Ltd.
- Lukes, Steven. (1986). *Power*. Oxford: Basil Blaskwell.
- Maclver, Robert M. (1926). *The Modern State*. London: Oxford University Press, 1926.
- Maclver, Robert M. (1961). *The Web of Government*. New York: The Macmillan Company.
- Mitchell, Joyce M. dan William C. Mitchell. (1969). *Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science*. Chicago: Rand Mc. Nally.
- Noer, Deliar. (1965). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Medan: Dwipa.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Robson, W. A. (1954). *The University Teaching of Social Sciences: Political Science*. (Teaching in the Social Sciences). Paris: UNESCO.
- Soltau, Roger F. (1961). *An Introduction to Politics*. London: Longmans.
- UNESCO. (1950). *Contemporary Political Science: A Survey of Methods, Research and Teaching*. Publication No. 426. Paris: UNESCO.